



Article Informations
Corresponding Email:
claresta.zd2@gmail.com

Received: 07/08/2024; Accepted:
23/10/2024; Published: 23/10/2024

IDIOSINKRATIK DONALD TRUMP DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT TERHADAP KRISIS KEMANUSIAAN DI VENEZUELA TAHUN 2017-2021

Claresta Zulfaa Destiana¹, Angga Nurdin Rahmat², Nala Nourma Nastiti³.

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Artikel ini adalah hasil dari penelitian mengenai “Idiosinkratik Presiden Donald Trump dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Krisis Kemanusiaan di Venezuela tahun 2017-2021”. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah mengetahui faktor idiosinkratik Donald Trump dalam membentuk kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap krisis kemanusiaan di Venezuela. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Adapun kerangka pemikiran yang digunakan adalah pendekatan konstruktivisme, konsep kebijakan luar negeri, dan konsep idiosinkratik. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh dari faktor idiosinkratik dari Presiden Donald Trump dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait penerapan *Monroe Doctrine* dari upaya perubahan rezim dengan intervensi militer menjadi penggunaan sanksi ekonomi terhadap krisis kemanusiaan di Venezuela. Dalam menganalisis hal tersebut peneliti menggunakan empat indikator karakteristik kepemimpinan menurut Margaret G. Hermann yaitu *Beliefs* (kepercayaan), *Motives* (alasan), *Decision Style* (tipe kebijakan), dan *Interpersonal style* (gaya hubungan antar individu).

Kata Kunci: Amerika Serikat, Kebijakan Luar Negeri, Venezuela, Krisis Kemanusiaan.

Abstract

This article is the result of research on “Idiosyncratic President Donald Trump in US Foreign Policy towards the Humanitarian Crisis in Venezuela 2017-2021”. The purpose of this research is to find out Donald Trump's idiosyncratic factors in shaping US foreign policy towards the humanitarian crisis in Venezuela. Data collection techniques through literature study. The framework used is the constructivism approach, the concept of foreign policy, and the concept of idiosyncratic. Based on the results of the study, it can be concluded that there is an influence of the idiosyncratic factors of President Donald Trump in US foreign policy related to the application of the Monroe Doctrine from efforts to change the regime with military intervention to the use of economic sanctions against the humanitarian crisis in Venezuela. In analyzing this, researchers used four indicators of leadership characteristics according to Margaret G. Hermann, namely Beliefs (beliefs), Motives

(reasons), Decision Style (type of policy), and Interpersonal style (style of relationships between individuals).

Keywords: *United States, Foreign Policy, Venezuela, Humanitarian Crisis*

PENDAHULUAN

Di bawah pemerintahan Nicolas Maduro pada tahun 2013, krisis politik, ekonomi, dan sosial berangsur terjadi di Venezuela. Krisis politik dilatarbelakangi oleh tindakan rezim Nicolas Maduro yang mengarah kepada pemerintahan otoriter yakni Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan yang kontroversial mengenai kewenangan presiden untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan agar pemerintah Venezuela tetap berjalan, serta menggantikan kewenangan legislatif Majelis Nasional dengan kewenangan Mahkamah Agung (Pandeectas Digital, 2017). Adapun, pemerintah Maduro membentuk Majelis Konstitusi Nasional untuk mereformasi negara Venezuela dan mempersiapkan konstitusi baru. Struktur ini memberi rezim Maduro kendali penuh atas kekuasaan publik (El Observatorio, 2020).

Di bidang ekonomi, Maduro gagal untuk mengatasi jatuhnya harga minyak global pada tahun 2014, hal ini diikuti oleh tingkat inflasi yang mencapai 56 persen dan menyebabkan efek domino pada bidang sosial, kelangkaan akan kebutuhan pokok, dan upaya pemerintah yang minim untuk memperbaiki situasi membuat tingkat kejahatan serta kelaparan semakin meningkat yang memunculkan gelombang protes dan demonstrasi masyarakat Venezuela. Dari krisis politik, ekonomi, dan sosial memicu gelombang protes terhadap pemerintahan Maduro naik dari 6,917 protes menjadi 9,787 pada tahun 2017 (OVCS, 2020). Kritikan dari pihak oposisi dan demonstrasi anti-pemerintah selalu ditanggapi dengan tindakan represif menggunakan kekerasan, penangkapan oleh aparat pemerintah, bahkan dengan kekuatan militer yang kemudian menciptakan krisis kemanusiaan. Adapun tindakan pemerintah terhadap permasalahan ekonomi dan sosial yang terjadi di Venezuela menjadi sorotan berbagai aktor di dunia internasional dimana bertentangan dengan praktik demokrasi (Watch 2014). Kemudian pada tahun 2018 Maduro kembali memenangkan pemilihan umum di Venezuela meskipun dinilai tidak sah sebab minimnya partisipasi dari partai-partai oposisi yang mencerminkan pemilihan umum tidak adil

dan tidak demokratis. Nicolas Maduro memenangkan pemilu 2018 karena kontrolnya terhadap instansi pemerintah seperti Mahkamah Agung, Majelis Nasional, dan CNE (*Consejo Nacional Electoral/National Election Council*). Maduro dan PSUV (*Partido Socialista Unido de Venezuela*) memiliki kontrol yang signifikan terhadap CNE, yang memiliki kewenangan untuk mengelola pemilu dan menetapkan aturan-aturan yang harus diikuti (Seelke 2018).

Rezim Maduro semakin membawa Venezuela berada dalam krisis ekonomi dan sosial yang semakin parah yang ditandai dengan semakin langkanya makanan, obat-obatan, dan bahan pokok. Produksi minyak yang semakin menurun menyebabkan hiperinflasi Venezuela yang kemudian terus menguras pendapatan rakyat Venezuela. Keruntuhan perekonomian dan meningkatnya krisis politik dan sosial ini mengakibatkan keluarnya pengungsi secara besar-besaran ke negara tetangga seperti Kolombia, Brazil, Amerika Serikat, pulau-pulau terdekat di Karibia seperti Trinidad, Tobago, Aruba, Curacao, serta ke daerah lain di wilayah Amerika Latin. Menurut laporan PBB, di pertengahan Juli 2018 terdapat sebanyak 2,3 juta warga Venezuela yang meninggalkan negaranya yang sebagian telah dimulai sejak tahun 2015 (Ellis 2017).

Melihat krisis yang terjadi di Venezuela, Amerika Serikat sebagai negara yang memiliki kedekatan geografis dengan kawasan Amerika Latin dan juga sebagai negara yang mempromosikan nilai-nilai demokrasi berupaya untuk turun tangan atas krisis yang terjadi melalui kebijakan luar negerinya. Amerika Serikat dalam merespons krisis kemanusiaan di Venezuela, melalui Presiden Donald Trump yang baru saja dilantik pada bulan Januari 2017 dengan kampanye *Maximum Pressure*-nya, berupaya untuk bertindak keras bahkan upaya untuk menggulingkan pemerintahan Maduro, termasuk opsi intervensi militer yang pernah disampaikan oleh Presiden Trump pada bulan Agustus 2017 (Jacobs 2017). Adapun menteri Luar Negeri Amerika Serikat pada saat itu yakni Rex Tillerson memaparkan pidatonya di Meksiko dalam pertemuan bersama negara Amerika Latin lainnya bahwa Doktrin Monroe masih relevan digunakan terhadap keterlibatan Amerika Serikat di negara Amerika Latin (OAS 2018). Kemudian pernyataan ini selaras dengan John Bolton Penasihat Keamanan Nasional

Amerika Serikat yang juga memaparkan dalam pidatonya di Miami, ia menyampaikan bahwa *“Today we proudly proclaim for all to hear: the Monroe Doctrine is alive and well”*, Dengan demikian menandakan Doktrin Monroe tersebut masih hidup dalam arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Amerika Latin (Embassy 2019). Lalu hal ini diperkuat dengan pemaparan pidato presiden Donald Trump pada Sesi ke-73 di Majelis Umum PBB, New York yang memaparkan bahwa kebijakan Doktrin Monroe sudah menjadi kebijakan formal Amerika Serikat di Amerika Latin (U.S. Embassy in Uruguay 2018).

Namun pada kenyataannya, menghidupkan kembali penerapan Doktrin Monroe di kawasan Amerika Latin khususnya intervensi militer yang disampaikan Presiden Donald J. Trump dalam krisis kemanusiaan di Venezuela yang bertujuan untuk menggulingkan rezim Nicolas Maduro tidak terlihat. Dalam kebijakannya Amerika Serikat cenderung mengambil pendekatan non-militer yakni melalui jalur diplomatik, diantaranya mengeluarkan serangkaian sanksi berupa EO 13808, EO 13827, EO 13835, EO 13850, EO 13857, dan EO 13884 (Office of Foreign Assets Control 2019). Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk menjadikan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap krisis kemanusiaan di Venezuela sebagai masalah penelitian karena terdapat anomali dalam isu tersebut yang dapat diteliti. Pertama, Presiden Donald Trump mengusulkan opsi intervensi militer untuk menggulingkan rezim Maduro, namun yang dilakukan adalah dengan pemberian sanksi ekonomi. Kedua, mengacu pada penerapan kembali Doktrin Monroe pada pemerintahan Trump dimana secara historis kebijakan ini akan membenarkan intervensi militer Amerika Serikat terhadap negara di kawasan Amerika Latin terutama ketika terjadinya krisis politik suatu negara, namun kebijakan yang dikeluarkan Trump terhadap Venezuela berupa upaya diplomatik meskipun telah mengakui presiden sementara Venezuela dan penggunaan sanksi ekonomi untuk menekan rezim Maduro.

Adapun opsi militer yang didasari pada penerapan Doktrin Monroe dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap krisis kemanusiaan di Venezuela tidak terlepas dari berbagai pengaruh dalam pembuatan kebijakan

itu sendiri. Unsur pembuatan kebijakan luar negeri salah satunya adalah pengaruh variabel kepribadian elit atau variabel idiosinkratik. Sehingga berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“Idiosinkratik Presiden Donald Trump dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Krisis Kemanusiaan di Venezuela tahun 2017-2021”**

PEMBAHASAN

Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Krisis Kemanusiaan di Venezuela Era Donald Trump

Amerika Serikat berupaya melakukan berbagai cara untuk menekan bahkan menggulingkan Pemerintahan Maduro termasuk dengan membuka opsi intervensi militer yang menjadi cita-cita Trump untuk melakukan transisi demokrasi di Venezuela guna menyelesaikan krisis politik, ekonomi, dan kemanusiaan yang berkepanjangan.

1. Penerapan *Monroe Doctrine*

Sejak menjabat, Pemerintahan Trump termasuk mantan Menteri Luar Negeri Rex Tillerson dan Menteri Luar Negeri saat ini Mike Pompeo, telah mempermosikan kebijakan *“America First”*, *“Maximum Pressure”*, dan kembali menganut Doktrin Monroe, yang menegaskan hak Amerika Serikat untuk membentuk nasib negara-negara di Amerika Latin . Didasari hal tersebut, untuk pertama kalinya setelah menjabat, Donald Trump menanggapi krisis kemanusiaan di Venezuela dengan pernyataan tidak akan mengesampingkan kekuatan militer dalam menghadapi Maduro (Jeff Abbott 2018).

2. Pemberian Sanksi Ekonom

Sanksi Amerika Serikat terkait minyak Venezuela umumnya difokuskan terhadap tiga hal, diantaranya yaitu 1) Akses terhadap pembiayaan utang jangka pendek dan distribusi uang tunai; 2) Transaksi perdagangan minyak antara Amerika Serikat dan Venezuela; serta 3) Transaksi perdagangan minyak antara Venezuela dengan pembeli non-AS. Adapun berikut serangkaian sanksi yang diberikan Amerika Serikat terhadap Venezuela:

- a. Executive Order 13808
- b. Executive Order 13827
- c. Executive Order 13835
- d. Executive Order 13850
- e. Executive Order 13857
- f. Executive Order 13884

3. Dukungan terhadap Pemimpin Oposisi Venezuela

Dalam mengupayakan perubahan rezim terhadap Presiden Nicolas Maduro, Amerika Serikat mengakui Juan Guaido dari Majelis Nasional sebagai presiden sementara (*Interim President*) Venezuela. Pengakuan ini dilakukan pada tanggal 23 Januari 2019 oleh Presiden Donald Trump tepat di hari yang sama dengan deklarasi Guaido di Caracas (Office of the Press Secretary 2019). Dalam pernyataannya, Trump mengatakan mengakui Ketua Majelis Nasional, Juan Guaido, sebagai Presiden interim Venezuela, dan akan bekerja secara konstruktif dengan Guaido dalam mendukung upayanya untuk mengembalikan legitimasi konstitusional.

4. Bantuan Kemanusiaan

Meskipun Amerika Serikat menjatuhkan sanksi berkali-kali terhadap Venezuela, Amerika Serikat juga turut memberikan bantuan kepada warga Venezuela yang berdampak atas krisis kemanusiaan di Venezuela. Pemerintah Amerika Serikat sendiri telah memberikan \$ 472 juta dalam bantuan kemanusiaan dan pembangunan untuk mendukung negara-negara yang menerima dan melindungi warga Venezuela, termasuk 56 juta dolar untuk kegiatan bantuan kemanusiaan di Venezuela sendiri. Pada Oktober 2019, USAID menandatangani perjanjian dengan pemerintahan sementara Guaido yang akan memungkinkan penyediaan 98 juta dolar dalam bantuan pengembangan tambahan untuk memperluas program yang mendukung hak asasi manusia, media independen, Majelis Nasional, dan pengawasan pemilu, juga untuk memulai program pertanian dan kesehatan.

Faktor Idiosinkratik Donald Trump

Peneliti melakukan analisa penelitian dengan menggunakan 4 indikator yang dikemukakan oleh Margaret G. Hermann yang digunakan dalam menganalisis mengenai faktor idiosinkratik suatu presiden terhadap perumusan kebijakan luar negeri. Adapun 4 indikator tersebut diantaranya adalah *Beliefs* (kepercayaan), *Motives* (alasan), *Decision Style* (tipe kebijakan), *Interpersonal Style* (gaya hubungan antar individu). Indikator tersebut akan digunakan untuk menganalisis pengaruh faktor idiosinkratik Presiden Donald Trump terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap krisis kemanusiaan di Venezuela periode 2019-2021.

1. *Beliefs* (Kepercayaan)

Beliefs atau kepercayaan sebagaimana didefinisikan oleh Hermann adalah asumsi dasar pandangan pemimpin negara terhadap keadaan dunia yang mempengaruhi interpretasi presiden tentang lingkungannya, yang pada akhirnya akan mempengaruhi strategi atau keputusan apa yang sebaiknya ditempuh untuk merespons suatu peristiwa (Hermann 1980). Pada penelitian ini kategori *beliefs* yang relevan adalah rasa nasionalisme Donald Trump. Opsi militer yang didasari atas prinsip Doktrin Monroe bertolak belakang dengan upaya Trump untuk menjaga kepentingannya di Venezuela yang berlandaskan janji kampanye *Make America Great Again*, maka dari itu meskipun Trump ingin menggulingkan Pemerintahan Maduro, pada akhirnya Trump memilih jalur diplomatik dalam pengambilan kebijakan luar negeri atas krisis yang terjadi di Venezuela, hal ini bertujuan untuk meminimalisir kerugian serta dampak buruk yang terjadi terhadap masa depan politik luar negeri Amerika Serikat dengan Venezuela. Maka dari itu, nasionalisme Trump menjadi landasan utama Donald Trump dalam mengambil kebijakan luar negeri untuk AS.

2. *Motives* (Alasan)

Hermann mendefinisikan hal tersebut sebagai suatu yang dapat dilihat dari *motives* seorang pemimpin. Terdapat dua jenis *motives* yang dapat mempengaruhi interpretasi seorang pemimpin, yaitu kebutuhan akan

kekuasaan (*Need for Power*) dan kebutuhan akan afiliasi/hubungan (*Need for Affiliation*) (Hermann 1980). Adanya ancaman opsi militer yang dilakukan Trump tersebut tidak lain dilandaskan sebagai buah dari otorisasi Donald Trump sebagai pemimpin Amerika Serikat yang ingin mendominasi atas kekacauan Venezuela. Hal tersebut pun semata-mata dinilai sebagai bentuk perlindungan diri Amerika Serikat dalam melihat krisis Venezuela yang dinilai dapat mengancam kawasan Amerika. Selain itu, Usulan opsi militer yang didasari atas penerapan prinsip Doktrin Monroe dianggap tidak sejalan dengan respons dan langkah negara di kawasan Amerika Latin dalam menanggapi krisis di Venezuela yang justru lebih memilih upaya diplomatik seperti yang tercantum dalam Deklarasi Grup Lima. Donald Trump ingin Amerika Serikat menjaga hubungan di Amerika Latin agar saling memelihara perdamaian (U.S. Embassy Jakarta, n.d.). Mengingat Amerika Latin adalah mitra dagang dengan pertumbuhan tercepat dan mitra kuat dalam pengembangan bahan bakar alternatif sebagai pemasok minyak terbesar ke Amerika Serikat sehingga Amerika Serikat perlu mempertahankan pengaruhnya di Amerika Latin (Press 2008).

3. Kompleksitas Konseptual Donald Trump

Menurut Hermann, kompleksitas konseptual mengacu pada tingkat nuansa dalam cara pemimpin memandang orang lain, tempat, ide, dan situasi. Latar belakang Trump sebagai seorang pebisnis yang sangat mengutamakan keuntungan dan melihat adanya kerugian, terlebih secara ekonomi. Dengan tidak adanya pengalaman menjadi presiden, keahlian atau minat terutama ketika bekerja dalam kondisi ketidakpastian, pemimpin akan berurusan dengan lingkungan mereka melalui cara 'heuristik yang masuk akal' bagi pemimpin tersebut seperti proses kognitif, afilatif, dan egosentris. Trump juga menekankan bahwa kongres perlu menurunkan keterlibatan militer yang menelan banyak anggaran di seluruh dunia (Brian Padden 2019). Trump mengambil langkah untuk menekan rezim Maduro dengan jalur diplomatik berupa sanksi secara terus-menerus, dikarenakan sanksi

ekonomi tidak akan memakan banyak biaya dan juga tidak merugikan kepentingan Amerika Serikat di Venezuela termasuk kawasan Amerika Latin. Hal ini mencerminkan kompleksitas konseptual Presiden Donald Trump yang rendah, dimana suatu isu dilihat dari segi keuntungan atau kerugian, terlebih secara ekonomi bagi AS.

4. *Interpersonal Style* (Hubungan antar Individu)

Interpersonal style ialah memahami bahwa dalam pembuatan kebijakan, seorang pemimpin akan berhadapan atau berlainan pendapat bahkan mungkin saja satu pemahaman dengan pembuat kebijakan lainnya. Trump mengkritik Bolton memiliki kebijakan yang agresif persoalan militer, Bolton tidak sejalan dengan kebijakan yang lebih lunak dengan menggunakan sanksi terhadap Venezuela. Kemudian dari perbedaan kebijakan antara Trump dengan Bolton membuat Trump tidak lagi mempercayai Bolton sebagai penasihat keamanan nasional dan memaksa Trump untuk mencabut jabatan Bolton pada tahun 2019. Peneliti melihat bahwa dengan keputusan Trump memecat jabatan Bolton menunjukkan ketidakpercayaannya terhadap Bolton yang sangat vokal terhadap perubahan rezim di Venezuela dengan militer atas penerapan Doktrin Monroe, hal ini dikarenakan Trump khawatir akan konsekuensi yang terjadi dari tindakan tersebut akan berdampak pada ketidakstabilan regional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap krisis kemanusiaan di Venezuela dipengaruhi oleh faktor idiosinkratik Trump. Dalam keempat indikator tersebut, *motives* dan *interpersonal style* merupakan indikator paling berpengaruh, sebab hal tersebut terlihat dari tindakan Trump yang mendukung Deklarasi Grup Lima sebagai bentuk kebutuhan Trump akan afiliasi serta pemecatan John Bolton. Sehingga Donald Trump semakin bisa mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk memilih menggunakan pendekatan diplomatik berupa sanksi ekonomi dan pengakuan terhadap presiden sementara Venezuela, Juan Guaido, daripada upaya opsi militer yang didasari atas penerapan Doktrin Monroe

DAFTAR PUSTAKA

- Brian Padden. 2019. "Trump: Penggunaan Kekuatan Militer Di Venezuela 'Suatu Opsi.'" *VOA Indonesia*, February 8, 2019. <https://www.voaindonesia.com/a/trump-penggunaan-kekuatan-militer-di-venezuela-suatu-opsi-/4777555.html>.
- Ellis, Robert Evan. 2017. "The Collapse of Venezuela and Its Impact on the Region." Army University Press. 2017. <https://www.armyupress.army.mil/Journals/Military-Review/English-Edition-Archives/July-August-2017/Ellis-Collapse-of-Venezuela/>.
- Embassy, U.S. Managua. 2019. "National Security Advisor Ambassador John R Bolton Delivers Remarks at Bay of Pigs Veterans Association Brigade." U.S. Embassy in Nicaragua. 2019. <https://ni.usembassy.gov/national-security-advisor-ambassador-john-r-bolton-delivers-remarks-at-bay-of-pigs-veterans-association-brigade-2506/>.
- Hermann, Margaret G. 1980. "Explaining Foreign Policy Behavior Using the Personal Characteristic of Political Leaders." *International Study Quarterly* 24 (1): 8–9. <http://www.jstor.org/stable/2600126?origin=JSTOR-pdf>.
- Jacobs, Ben. 2017. "Trump Threatens 'military Option' in Venezuela as Crisis Escalates." *The Guardian*, August 12, 2017. <https://www.theguardian.com/world/2017/aug/11/donald-trump-venezuela-crisis-military-intervention>.
- Jeff Abbott. 2018. "Trump Team Revives Monroe Doctrine." *The Progressive Magazine*, November 1, 2018. <https://progressive.org/magazine/trump-team-revives-monroe-doctrine/>.
- OAS, U.S. Mission to the. 2018. "Secretary Tillerson Delivers Address on U.S. Engagement in the Western Hemisphere." U.S. Mission to the Organization of American States. 2018. <https://usoas.usmission.gov/secretary-tillerson-delivers-address-u-s-engagement-western-hemisphere/>.
- Office of Foreign Assets Control. 2019. "Venezuela-Related Sanctions." U.S. Department of The Treasury. 2019. <https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/venezuela-related-sanctions>.
- Office of the Press Secretary. 2019. "Statement from President Donald J. Trump Recognizing Venezuelan National Assembly President Juan Guaido as the Interim President of Venezuela." U.S. Embassy & Consulate in Ecuador. 2019. <https://ec.usembassy.gov/statement-from-president-donald-j-trump-recognizing-venezuelan-national>
- Press, Council on Foreign Relations. 2008. "Hubungan AS-Amerika Latin." <https://www.cfr.org/report/us-latin-america-relations>.
- Seelke, Clare Ribando. 2018. "Venezuela's 2018 Presidential Elections." CRS Insight. 2018. <https://sgp.fas.org/crs/row/IN10902.pdf>.
- U.S. Embassy in Uruguay. 2018. "Remarks by President Trump to the 73rd Session of the United Nations General Assembly." September 25, 2018. <https://uy.usembassy.gov/remarks-by-president-trump-to-the-73rd-session-of-the-united-nations-general-assembly/>.
- U.S. Embassy Jakarta. n.d. "Presiden Donald J. Trump Mengumumkan Strategi Keamanan Nasional Untuk Memajukan Kepentingan Amerika."

Kedutaan Besar Dan Konsulat AS Di Indonesia.
<https://id.usembassy.gov/id/presiden-donald-j-trump-mengumumkan-strategi-keamanan-nasional-untuk-memajukan-kepentingan-amerika/>.
Watch, Human Right. 2014. "World Report 2015: Venezuela Events of 2014."
<https://www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/world-report-2015-venezuela>.